

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu ciri penting era globalisasi adalah tingginya tingkat persaingan yang meliputi hampir disemua lini kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi dasar sekaligus ujung tombak berkembangnya informasi global yang memantek lahirnya budaya global yang berdampak pada berubahnya pola perilaku manusia. Idealnya perubahan besar tersebut mampu meningkatkan mutu sumber daya manusia disegala bidang. Tetapi kenyataannya berdasarkan laporan dari *World Economic Forum* (WEF) melalui portalnya <http://www.weforum.org>. Mempublikasikan ranking (peringkat) daya saing global (*The Global Competitiveness Report (GCR)*), Indonesia pada tahun 2015-2017 hanya berada di urutan 34 dari 144 negara. Sementara Singapura diurutan ke-2, Jepang (6), Taiwan (14), Malaysia (20), Korsel (26), China (28), dan Thailand (31) (<http://www.kemenkeu.go.id>, pada tanggal 14 Oktober 2018 pukul 16.30 WIB). Kenyataan tersebut setidaknya juga menunjukkan bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia.

Adalah benang merah yang bisa diambil dari uraian di atas bahwa peningkatan mutu sumber daya manusia sebenarnya bisa dilakukan melalui pendidikan, karena pendidikan akan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia dan daya saing ditingkat global. Sejalan dengan hal itu, Rosniati Hakim menyatakan bahwa:

Pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia jangka panjang dan mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia dan bekal hidup di akhirat kelak. Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang pada hakikatnya berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil,

dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik aspek jasmaniyah maupun rohaniyah. Pendidikan itu bertugas mempersiapkan generasi anak-anak bangsa sejak kecil melalui berbagai lembaga pendidikan agar mampu menjalani kehidupan dengan sebaikbaiknya di kemudian hari sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Namun pendidikan anak dibidang ilmu dan teknologi, perlu diimbangi dengan pendidikan agama, sebagai alat kendali yang menentukan arah dan kehidupan mereka dalam menentukan harkat dan martabat mereka sepanjang masa secara utuh, seimbang, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat (Rosniati Hakim, *Tantangan Dan Peluang Sistem Pendidikan Islam Berbasis Peningkatan Mutu*, diakses dari <http://tarbiyahainib.ac.id>, pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 19.45 WIB.). Sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter utama hanya dapat dihasilkan oleh sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945. Pendidikan tersebut dalam prosesnya tidak hanya menenkankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi sekaligus sebagai proses aktualisasi diri yang mendorong peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan tinggi dan berkeadaban dunia. Karenanya pendidikan nasional yang selama ini berlaku harus direkonstruksi menjadi sistem pendidikan yang mencerahkan visi terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulia dan berkemajuan.

Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan Fasli Jalal yang mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan bukan saja dapat diketahui dari mutu individu warga negara, melainkan juga erat kaitanya dengan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, 2007: 13) Masih rendahnya daya saing di bidang ekonomi dan pendidikan berdasarkan data tersebut harus dijadikan motivasi dalam rangka melakukan pembinaan dan perbaikan sistem pendidikan nasional kita. Dalam bidang pendidikan, peningkatan mutu adalah satu hal yang harus menjadi prioritas jika kita tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditingkat global. Hal tersebut

dikarenakan secara secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah.

Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di perkotaan, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup mengembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan. Menurut Umaedi, saat ini dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dengan rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak sampai tuntas, atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorintasi proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan SDM yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa (Umaedi, 2008:1).

Hal tersebut masih sangat kontradiktif dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dan pada bab III pasal 4 ayat 6 disebutkan pula bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Akibat dari kontradiksi tersebut sebagian masyarakat menjadi pesimis terhadap sekolah. Ada anggapan bahwa pendidikan tidak lagi mampu menciptakan mobilitas sosial mereka secara vertikal, karena sekolah tidak menjanjikan pekerjaan yang layak. Sekolah kurang menjamin masa depan anak yang lebih baik. Sebagaimana diungkapkan di muka, perubahan paradigma baru pendidikan kepada mutu (*quality oriented*) merupakan salah satu strategi untuk mencapai pembinaan keunggulan pribadi anak (Syafaruddin,2012:19).

Terkait faktor penyebab masih rendahnya mutu pendidikan nasional kita, para ahli dan pemerhati pendidikan di tanah air memiliki beragam pendapat. Menurut Umaldi, setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang berhasil. *Pertama*, strategi pembangunan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. *Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi ditingkat pusat.

Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan ditingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Dengan kata lain, bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Sejalan dengan pendapat di atas, Abdurrahman Shaleh menyatakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan menurun dan mengalami perkembangan yang tidak merata. Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan educational *production function* atau input-output yang dilaksanakan secara tidak konsekuen. Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah (madrasah) sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah setempat. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini pada umumnya lebih bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas) (Abdurrahman Shaleh, 2004:243-244). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen yang tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Berbagai kebijakan di atas menjelaskan bahwa untuk mencapai pendidikan bermutu tidak hanya melakukan pemenuhan pada aspek input dan output saja, namun yang lebih penting adalah aspek proses. Menurut Mulyasa, proses yang dimaksud adalah pengambilan keputusan, pengelolaan program, proses pengelolaan kelembagaan, proses belajar mengajar dan proses monitoring dan evaluasi dengan catatan proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan proses-proses yang lainnya. (Mulyasa, 2011:167)

Hari Suderajat, memaparkan penyebab utama rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dalam komparasi internasional adalah akibat kebijakan sentralisasi pendidikan yang terimplementasi setidaknya dalam lima kebijakan. *Pertama*, implementasi kurikulum 1994 dengan suplemennya tahun 1999 menciptakan pola kegiatan belajar yang padat dengan *transfer of knowledge* cenderung menghasilkan verbalisme, dimana metode ceramah dan hafalan menjadi andalan. padahal seharusnya metode pembelajaran seperti *mastery learning*, *discovery learning*, dan *inquiry learning* yang dijadikan metode utama. *Kedua*, sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan disekolah lebih berorientasi pada banyaknya tarap serap kurikulum sehingga obyek pengawasan hanya terfokus pada administrasi kelas yang dilaporkan guru, belum menguji sejauh mana kemampuan siswa dalam satu mata pelajaran tertentu. *Ketiga*, evaluasi pembelajaran lebih cenderung menguji ingatan (*recall*) dan hafalan yang menurut John Dewey materi pengetahuan merupakan muatan mati daripada keterampilan berpikir, kecakapan mengobservasi dan kecakapan mengkonstruksi. *Keempat*, kebijakan menjadikan nilai hasil ujian nasional identik dengan mutu pendidikan. Padahal meteri yang diujikan pada UN baru menyentuh pada bidang kognitif saja sedangkan affektif dan psikomotor seolah-olah dikesampingkan. *Kelima*, akibat dari kebijakan menempatkan hasil UN menjadi penentu kelulusan maka para siswa yang merasa harapannya tidak terpenuhi di sekolah, kemudian berbondong-bondong mengikuti pelajaran tambahan dalam bentuk bimbingan belajar diluar sekolah, semata-mata untuk meraih nilai UN yang setinggi-tingginya (Hari Suderajat, 2005:39-41).

Dengan sistem pendidikan yang sentralistik akan mengakibatkan proses pembelajaran bersifat indoktrinatif dan intimidasi ketimbang analitik dan hanya bersifat *transfer of knoweledge*, tidak mengembangkan keanekaragaman kreativitas dan kemampuan berpikir yang menghasilkan prestasi bakat dan minat peserta didik. Dengan melihat hal ini perlu dilakukan perubahan yang mendasar dan bersifat linier, berkesinambungan, bersifat multidimensional dan radikal (Syaiful Sagala, 2006:14).

Tokoh pendidikan Tilaar menyebutkan bahwa krisis pendidikan berkisar pada krisis manajemen. Sebagai kulminasi dari krisis tersebut adalah kualitas pendidikan pun masih rendah dan sisi pengelolaan sumber daya masih belum efisien (H.A.R. Tilaar, 2008:77). Menurut Deming seperti yang dikutip oleh Syafaruddin, 80% dari masalah mutu lebih disebabkan oleh faktor manajemen, sedangkan sisanya 20% oleh faktor sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa mutu yang kurang optimal berawal dari manajemen yang tidak profesional dan manajemen yang tidak profesional artinya mencerminkan kepemimpinan dan kebijakan yang tidak profesional pula (Syarafuddin, 2014: 19).

Abdul Hadis dan Nurhayati, menyatakan bahwa dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar dikelas, dilaboratorium, dan kancha belajar lainnya melalui fasilitas internet, aplikasi metode, strategi, dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumber daya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan juga profesional. Juga sangat penting adanya standar nasional pendidikan yang menjadi norma acuan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencakup standar : isi, proses, kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Dalam perspektif mikro atau tinjauan secara sempit dan khusus, faktor dominan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan ialah guru yang profesional dan guru yang sejahtera. Oleh karena itu guru sebagai suatu profesi harus profesional dalam melaksanakan berbagai

tugas pendidikan dan pengajaran, pembimbingan dan pelatihan yang diamanahkan kepadanya (Malik Fajar, 2010:35).

Di sisi lain Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan pemerintah merupakan kriteria standar minimal yang harus dipenuhi oleh semua jenjang pendidikan. Namun hingga saat ini implementasinya di lapangan dinilai banyak kalangan secara umum belum memberikan hasil yang signifikan. Standar isi dan standar kompetensi lulusan belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh seluruh lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan yang masih minim fasilitas dan sumber daya manusia baik guru, kepala sekolah/madrasah maupun staf. Dilihat dari sisi standar proses suasana pembelajaran yang kondusif, aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan boleh dikatakan belum terinternalisasi dengan baik oleh para pendidik dalam proses pembelajaran.

Guru kesulitan dalam mengimplementasikan pemenuhan tuntutan standar proses dalam pembelajaran. Pembelajaran cenderung berjalan secara konvensional. Faktor yang mempengaruhi antara lain disebabkan media dan peralatan pembelajaran yang minim di sekolah, jumlah siswa yang terlalu besar dalam satu kelas, sehingga tidak mendukung diterapkannya pembelajaran yang aktif dan kreatif yang berpusat kepada siswa. Pendekatan pembelajaran yang terjadi lebih sering berpusat pada guru (*teacher-centred approaches*). Dari sisi standar pendidik, kompetensi profesional: kecakapan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran; kecakapan guru menentukan dan menyajikan materi esensial; masih mengandalkan LKS yang dijual dipasaran, belum membuat bahan ajar sendiri; sains disajikan secara teoritis, belum menggunakan laboratorium secara optimal. Untuk kompetensi pedagogik : strategi yang digunakan kurang tepat; gaya mengajar yang kurang menyenangkan peserta didik; peran sebagai pendidik, pengajar dan pelatih belum optimal; tugas yang terlalu padat kepada peserta didik. Pada kompetensi sosial/interpersonal: sebagian guru masih kurang terbuka terhadap kritikan teman sejawat.

Sedangkan pada kompetensi personal/individu: sebagian sikap dan perilaku guru belum bisa diteladani; kurang menerapkan disiplin bagi anak

didik, komitmen, kinerja dan keihlasan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran masih kurang. Dalam hal upaya pengembangan diri, sebagian guru memiliki minat baca yang rendah, budaya mental dalam belajar yang hanya berorientasi pada ijazah dan pangkat; suka mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan sesuatu, misalnya menyalin RPP yang sudah ada tanpa menyesuaikan dengan kondisi sekolah tempat bekerja, Persoalan di atas senada dengan pendapat Malik Fadjar, yang mengungkapkan bahwa rendahnya mutu pendidikan meliputi seluruh sistem kependidikannya, terutama system manajemen dan etos kerja, kualitas guru, kurikulum, dan sarana fisik dan fasilitasnya (Malik Fajar, 2010:41). Hal yang sama juga diungkapkan Suprayogo, yang menyatakan bahwa permasalahan pendidikan kita bak lingkaran setan dimana posisi sekolah berada dalam sebuah problem yang bersifat *causal relationship*; dari problem dana yang kurang memadai, fasilitas yang kurang, pendidikan apa adanya, kualitas rendah, semangat mundur, inovasi rendah dan minat kurang, demikian seterusnya berputar bagai lingkaran setan (Imam Suprayogo, 2010:220-222).

Biaya pendidikan dan pengelolaan lembaga pendidikan juga merupakan hal yang cukup riskan menimbulkan persoalan mutu pendidikan hampir diseluruh wilayah tanah air. Biaya pendidikan yang cenderung tinggi di beberapa sekolah mengakibatkan tidak semua masyarakat bisa mengakses pendidikan bermutu.

Meskipun secara umum implementasi kedelapan standar nasional pendidikan tersebut pada banyak satuan pendidikan masih menuai berbagai persoalan di lapangan, namun pada beberapa sekolah/madrasah justru menunjukkan kondisi yang berbeda. Misalnya pada SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus. Berdasarkan observasi awal pada bulan Agustus 2018 diperoleh informasi adanya beberapa komponen standar nasional pendidikan yang dinilai telah terlaksana dengan baik, yaitu standar isi, standar proses dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pada standar isi SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus telah memiliki tim pengembang kurikulum sekolah. Kedua SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus telah

membina dan mengembangkan Program muatan lokal, pengembangan diri dan kegiatan ekstra kurikuler dalam kurikulumnya. Pada standar proses, SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus telah mampu secara mandiri menyusun silabus dan RPP, menyiapkan bahan ajar yang kemudian mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran dalam suasana yang tertib, disipilin dan sangat kondusif.

Sedangkan pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus bukan saja telah memenuhi ketentuan standar minimal kualifikasi pendidik jenjang pendidikan SD yaitu S1, bahkan sebagian guru telah mencapai kualifikasi akademik S2 sesuai bidangnya masing-masing. SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus tersebut merupakan sekolah yang berada di tengah kota dan telah beroperasi baru 8 tahun namun tetap *sustainable* di tingkat sekolah dasar. Bahkan SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus menapaki siklus peningkatan prestasi yang lebih baik dibanding beberapa sekolah yang lain di Kabupaten Kudus.

SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus memiliki prestasi bukan saja pada tingkat daerah bahkan hingga tingkat nasional dan internasional. Pada tingkat Internasional SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus ini pernah meraih prestasi pada kegiatan *Students Exchange* di Malaysia, *Matematic International* di Bangkok, Singapura dan beberapa prestasi tingkat nasional seperti kompetisi Sains Nasional, olimpiade matematika dan sains.

Berbagai prestasi dan kemajuan-kemajuan yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus tersebut khususnya pada tiga standar nasional pendidikan berdasarkan pengamatan ternyata belum sepenuhnya dapat dicapai oleh satuan pendidikan (SD) yang lain yang ada di Kota Kudus.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berupaya menggali fenomena/keunikan tentang beberapa keunggulan SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus dalam hal manajemen peningkatan mutu terutama pada tiga standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar proses dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus dinilai merupakan satuan pendidikan yang mampu

mewakili sekolah di lingkungan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam hal peningkatan mutu dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi satuan pendidikan yang lain pada jenjang yang sama dalam hal manajemen peningkatan mutu.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang manajemen peningkatan mutu sekolah berkemajuan di SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus yang dijabarkan dalam sub-sub fokus sebagai berikut:

1. Tata kelola kurikulum di SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus dalam mewujudkan sekolah yang berkemajuan.
2. Tata kelola sarana prasarana di SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus dalam mewujudkan sekolah yang berkemajuan.
3. Tata kelola sumber daya manusia di SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus dalam mewujudkan sekolah yang berkemajuan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata kelola kurikulum di SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus dalam mewujudkan sekolah yang berkemajuan?
2. Bagaimana tata kelola sarana prasarana di SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus dalam mewujudkan sekolah yang berkemajuan?
3. Bagaimana tata kelola sumber daya manusia di SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus dalam mewujudkan sekolah yang berkemajuan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Mendeskripsikan tata kelola kurikulum di SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus dalam mewujudkan sekolah yang berkemajuan
2. Mendeskripsikan tata kelola sarana prasarana di SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus dalam mewujudkan sekolah yang berkemajuan

3. Mendeskripsikan tata kelola sumber daya manusia di SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus dalam mewujudkan sekolah yang berkemajuan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu manajemen pendidikan khususnya bidang pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pembelajaran.

2. Secara Praktis

Bahan evaluasi pengembangan kurikulum yang telah dilakukan, bahan rujukan untuk peningkatan mutu pembelajaran, bahan kajian dalam peningkatan mutu pendidikan. Manfaat bagi guru adalah untuk acuan peningkatan mutu pembelajaran, referensi untuk peningkatan mutu pendidikan, bahan kajian dalam peningkatan mutu pembelajaran.